



Prof Ali Agus

Dekan Fakultas Peternakan UGM
Ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani
Indonesia - DI Yogyakarta

Beban berat petani peternak dan usaha peternakan untuk menyediakan pangan hewani sebagai sumber protein vital ternyata belum menghasilkan tingkat keberdayaan hidup yang sesuai dengan perannya, alih-alih bicara tentang tingkat kesejahteraan untuk mereka. Padahal, jumlah rumah tangga peternakan Indonesia yang jelas terkait dengan angka nilai tukar itu adalah sejumlah 13,56 juta rumah tangga, berdasar survei Pertanian Antar Sensus 2018 (SUTAS 2018)

Protein Hewani dan

Sehari setelah proklamasi, 75 tahun yang lampau, jika dicermati betul, maka sektor pertanian termasuk sub sektor peternakan sebenarnya mendapatkan mandat dari pendiri negeri untuk berperan dalam menegakkan eksistensi bangsa dan negara, sebagaimana yang tertulis pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Khususnya pada frasa "...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..".

Pada hakikatnya, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah membentuk individu-individu manusia Indonesia seutuhnya yang memiliki otak (akal), fisik, dan mental-spiritual yang unggul dan berdaya saing. Membangun Sumber Daya manusia (SDM) Indonesia seutuhnya yang unggul hanya dapat diraih apabila memenuhi tiga syarat utama yaitu pangannya cukup, badannya sehat, dan otaknya cerdas.

Badan sehat dan otak cerdas pondasinya di mulai dari kecukupan pangan sejak dalam kandungan, 1.000 hari *post natal*, *golden age* dan dilanjutkan selama masa pertumbuhan. Kesuksesan pertumbuhan yang menjadi modal dasar perkembangan calon generasi penerus bangsa pada periode itu ditentukan oleh faktor dominan yaitu konsumsi pangan bergizi tinggi (daging, telur, susu atau air susu ibu). Tak ada pilihan, maka pengembangan peternakan sebagai produsen protein hewani merupakan jalan yang tidak bisa ditawar lagi.

Masih dalam suasana pelantikan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang baru yaitu Dr Nasrullah, maka pada kesempatan ini pula penulis secara pribadi, maupun mewakili civitas akademika Fakultas Peternakan UGM dan Dewan Pengurus Provinsi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia DI Yogyakarta mengucapkan selamat bertugas mengemban amanah pembangunan sub sektor peternakan. Tentu banyak yang masih harus dikejar untuk mengurai persoalan dan untuk berinovasi dalam meningkatkan percepatan produksi dan

meningkatkan efisiensi produksi pangan hewani dengan tetap mempertahankan semangat kemandirian.

Pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran yang sangat berharga, menggugah kesadaran betapa kemandirian pasokan pangan termasuk pangan protein hewani adalah sangat penting. Daging sapi yang 40 % masih tergantung pada impor dan juga susu yang mencapai 80 % ketergantungannya pada luar negeri, harus segera dicarikan jalan keluarnya secara lebih baik, bijak, mandiri, dan rasional.

Perunggasan yang telah mampu memenuhi kebutuhan daging ayam dan telur di dalam negeri, semestinya dijaga agar tidak sering berfluktuasi yang mengakibatkan terpuruknya pelaku usaha. Akhir-akhir ini fluktuasi harga jual produk unggas (daging *broiler*, telur) sangat rawan menjadi penyebab bangkrutnya pelaku usaha khususnya peternak kecil dan menengah yang mandiri. Persaingan global dan terbukanya pasar domestik bagi produk unggas impor pun dapat menjadi penyebab hancurnya usaha dan kemudian pasar dalam negeri dikuasai oleh produk unggas global.

Disamping itu, perlu digarisbawahi pula bahwa daging sapi, yang merepresentasikan daging merah, tak bisa 100 % digantikan oleh daging putih (ikan dan unggas). Karena zat besi dan nutrien spesifik lainnya lebih mudah dicukupi dari daging sapi dan daging ruminansia lainnya. Zat besi merupakan zat gizi penting untuk pembentukan hemoglobin darah, yang mentransportasikan oksigen untuk metabolisme. Kadar hemoglobin darah juga dipakai oleh dokter anak untuk indikator kesehatan fisiologis, mengukur potensi pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak. Inilah urgensi kecukupan protein hewani asal ternak seperti telur, daging ayam dan daging sapi.

Peternakan untuk Kesejahteraan

Sub sektor peternakan juga merupakan area untuk mewujudkan kesejahteraan



Mandat Indonesia Merdeka

umum, dengan menjalankan usaha dari mata rantai industri peternakan. Sub sektor ini menanggung banyak beban sekaligus, beban memasok pangan hewani dalam jumlah cukup dan berkualitas demi kekuatan dan kecerdasan anak bangsa. Beban mensejahterakan pelaku dan tenaga kerja di dalamnya, juga beban untuk tetap layak dan bahkan berkembang secara ekonomi usaha.

Secara makro, sub sektor ini mampu menyumbang PDB sebesar Rp 184 triliun pada 2015 dan naik sangat signifikan menjadi Rp 257 triliun pada 2019. Pada kuartal pertama 2020, PDB sub sektor peternakan masih gagah di angka Rp 65,52 triliun yaitu masih lebih tinggi dibanding kuartal pertama 2019 yaitu di angka Rp 62,13 triliun. Meskipun pada kuartal kedua 2020 mengalami kontraksi -1,83 %. Hal ini merupakan efek dari tekanan berat ekonomi nasional akibat penurunan permintaan produk peternakan, seiring banyaknya restoran, catering, dan jasa boga yang tutup akibat pembatasan sosial selama pandemi. Penurunan ini sama sekali bukan karena berhentinya sektor *input* dan produksi.

Pekerjaan besar yang menunggu penyelesaian serius terlihat dari indikator Nilai Tukar Petani Peternak (NTPT) yang dikeluarkan BPS juga menunjukkan petani peternak masih mengalami defisit pada harga yang diterima dibandingkan dengan harga konsumsi yang dibayarkan. Pada Januari 2020, NTPT 98,06 % menurun menjadi 96,40 % pada April karena pandemi dan telah sedikit membaik dibandingkan awal tahun, pada Juli NTPT sebesar 99,94 %. Yang lebih memprihatinkan lagi, pada bulan-bulan yang sama dengan di atas, Nilai Tukar Usaha Pertanian Peternakan (NTUPT) berada pada angka 97,79 %; 96,40 % dan 99,78 %.

Beban berat petani peternak dan usaha peternakan untuk menyediakan pangan hewani sebagai sumber protein vital ternyata belum menghasilkan tingkat keberdayaan hidup yang sesuai dengan perannya, alih-alih

bicara tentang tingkat kesejahteraan untuk mereka. Padahal, jumlah rumah tangga peternakan Indonesia yang jelas terkait dengan angka nilai tukar itu adalah sejumlah 13,56 juta rumah tangga, berdasar survei Pertanian Antar Sensus 2018 (SUTAS 2018).

Buku statistik peternakan yang dikeluarkan Ditjen PKH menunjukkan sub sektor peternakan melibatkan 4,83 juta tenaga kerja pada 2018. Naik signifikan dibandingkan dengan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang digelar 2017 oleh BPS, dengan angka 4,20 juta tenaga kerja peternakan. Sakernas menyajikan data jumlah terbesar tenaga kerja bidang peternakan pada kelompok umur lebih dari 60 tahun, sejumlah 929.383 orang atau 22,11 %, kemudian estafet generasi penerus adalah mereka yang berusia 35-39 tahun dan diharapkan mampu bertahan dalam mengelola usaha bidang peternakan sebesar 410.919 orang atau 9,78 %. Angka dan persentase ini cukup mengkhawatirkan dari sisi kaderisasi SDM peternakan.

Sedikit lega, pekerjaan bidang peternakan diminati secara merata oleh semua kelompok umur, mulai usia 15 tahun hingga lebih dari 60 tahun. Kelompok umur 15-19 tahun cukup banyak yang berminat terjun di dunia peternakan, yaitu 321.946 orang atau 7,66 %.

Majalah TROBOS Livestock edisi Juni 2020 memuat data tenaga kerja sektor peternakan berusia di atas 60 tahun sebanyak 1,1 juta orang (23,75 %), berpendidikan Sekolah Dasar sebanyak 1,6 juta orang (33,78 %), dan berpendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 66 ribu orang (0,72 %).

Menyoroti angka NTPT, NTUPT, dan ketenagakerjaan itu dapat dimaknai jika tidak memiliki usaha sektor lain – secara umum sektor ini belum mampu memberikan kesejahteraan. Pernyataan ini bukanlah untuk menutup mata pada ribuan pengusaha peternakan dan ratusan ribu karyawannya yang berhasil mentas dan sejahtera dengan usaha dan pekerjaan mereka. Namun

menekankan pada unsur pemerataan akan kue kesejahteraan dari sub sektor peternakan secara umum dan luas yang masih membutuhkan perhatian besar. Masih banyak pelaku usaha peternakan dan tenaga kerjanya yang mengantri di strata terbawah sub sektor ini.

Pendekatan SDM

Mengatasi problematika ini, selain menggunakan pendekatan sistemik dan teknis industri, harus pula dibenahi dengan pendekatan peningkatan kualitas SDM. SDM yang unggul diharapkan mampu berinovasi, memiliki kemampuan manajemen teknis maupun ekonomi, terbuka terhadap teknologi, memiliki akses terhadap sumber daya modal dan mampu membangun jejaring. Sebagai pekerja, SDM yang terdidik dan atau terlatih akan memiliki kemampuan memajukan usaha peternakan tempatnya bekerja. Atau setidaknya memiliki peluang bekerja pada industri peternakan yang lebih modern sehingga berpeluang mendapatkan upah/gaji yang jauh lebih tinggi. SDM peternakan dapat dibangun melalui 3 jalur, yaitu jalur keilmuan, jalur profesi (insinyur peternakan dan dokter hewan), dan jalur vokasi (pendidikan kejuruan berbasis praktik industri). Insinyur Peternakan merupakan profesi yang telah memiliki payung hukum berupa UU No 11/2014 dan PP 25/2019 yang mengatur dan melindungi profesi keinsinyuran termasuk insinyur peternakan. Diatur pula sanksi yang sangat tegas bagi non-insinyur yang melakukan praktik keinsinyuran.

Kehadiran SDM profesional seperti Insinyur Peternakan diharapkan dapat membantu memajukan industri peternakan penghasil pangan hewani berkualitas. Di sisi lain, peningkatan konsumsi protein hewani apalagi yang berasal dari produksi dalam negeri tentu akan memajukan industri peternakan. Dengan demikian akan tercipta lapangan kerja dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, sebagai mandat Indonesia Merdeka.

●TROBOS